

Penanggulangan Kemiskinan Daerah

by Sunardi Sunardi

Submission date: 01-Feb-2023 11:19AM (UTC+0700)

Submission ID: 2003854068

File name: Penanggulangan_Kemiskinan_Daerah_Bab_IV-V.pdf (10.13M)

Word count: 5462

Character count: 46144



PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH



Dr. Sunardi, SE.,MM

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Dr. Sunardi, S.E., MM



Penerbit : CV. Zenius Publisher

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Dr. Sunardi, S.E., MM

Editor: Puput Dani Prasetyo Adi
Januari 2023
Size: 210 x 297 mm, 107 pages.

ISBN : 978-623-5264-21-9

Published by: CV. Zenius Publisher

Anggota IKAPI Jabar

Jalan Waruoyom-Depok- Cirebon 45155,

Email : zenius955@gmail.com

Telp: (0231)8829291

Web. zeniuspublisher.com

Hak cipta dilindungi Undang-undang. Tidak ada bagian dari publikasi ini yang boleh direproduksi, disimpan dalam sistem pengambilan, atau ditransmisikan, dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun, elektronik, mekanik, fotokopi, rekaman, atau lainnya, kecuali untuk dimasukkannya kutipan singkat dalam ulasan, tanpa terlebih dahulu izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena Rahmat dan HidayahNya, Penulis dapat menyelesaikan Buku ini yang berjudul **“Penanggulangan Kemiskinan Daerah”**. Kami panjatkan terimakasih kepada kedua orangtua penulis, berkat kasih sayangnya dan doanya yang membuat penulis mendapatkan berbagai kemudahan dan keberhasilan dalam hidup, yang salah satunya dapat menyelesaikan buku ini dengan baik. Kami haturkan terimakasih kepada rekan-rekan di Universitas Merdeka Malang, mulai dari Jajaran rektorat, mulai Ketua Yayasan Universitas Merdeka Malang, Bapak Kol. (Purn) H. Toegino Sokarno, SE, Rektor Prof.Dr.Anwar Sanusi, S.E., M.Si., Wakil Rektor 1. Dr. Sukardi, M.Si, Wakil Rektor 2 Dr.Prihat Assih, Wakil Rektor 3. Dr. Rudi Haryanto, dan semua kalangan yang membantu dalam penulisan buku ini, sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

Buku ini akan membahas tentang kondisi kemiskinan di daerah atau gambaran umum daerah dan proses penanggulangan kemiskinan dengan melihat satu faktor *performance* dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Untuk itu secara spesifik, anda yang membaca buku ini akan mendapatkan informasi penting tentang landasan hukum penyusunan laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah (LP2KD), data luas wilayah, jumlah desa/kelurahan dan jumlah dusun, sehingga dapat membandingkan jumlah penduduk dari setiap dusun dan juga membandingkan tingkat penduduk miskin di daerah tersebut.juga kondisi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang ada di daerah (TKPKD) dalam tugasnya melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan dan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di suatu daerah. Kemudian mengetahui tentang pelaksanaan kebijakan (Program, anggaran, dan regulasi) dalam penanggulangan kemiskinan daerah. Dan mengetahui tentang keberhasilan-keberhasilan yang sudah dicapai dalam rangka penanggulangan kemiskinan di daerah.

Saya sangat mengharapkan buku ini dapat dibaca oleh setiap kalangan, sehingga setiap kalangan baik akademisi, praktisi, mahasiswa, maupun umum mendapatkan manfaat dari adanya buku ini, minimal mengetahui dan dapat menganalisis tentang kondisi kemiskinan di suatu daerah dan langkah –langkah tepat yang dapat dilakukan dalam rangka penanggulangan kemiskinan khususnya di daerah.

Malang, 20 Januari 2023

Dr. Sunardi., SE., MM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL.....	ix

BAB I. KEMISKINAN DI INDONESIA

1.1	Pengertian dan Latar Belakang Kemiskinan	1
1.2	Usaha penanggulangan Kemiskinan oleh Kementerian Sosial RI.....	3
1.3	Usaha penanggulangan Kemiskinan Daerah (Studi kasus di Jombang)	6
1.4	Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Studi Kasus Kabupaten Jombang)	8
1.5	Landasan Hukum tentang Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Studi Kasus Kabupaten Jombang)	8

BAB II. KEMISKINAN DI INDONESIA

2.1.	Gambaran Umum Daerah (Studi Kasus: Kabupaten Jombang).....	11
2.2.	Gambaran Demografis	13
2.3.	Gambaran Ekonomi Daerah	14
2.3.1.	Struktur Ekonomi	14
2.3.2.	Pertumbuhan Ekonomi	16
2.3.3.	Tingkat Inflasi	21
2.4.	Kondisi Kemiskinan Multidimensi	22
2.4.1.	Dimensi Ekonomi dan Ketenagakerjaan	22
2.4.2	Persentase Penduduk Miskin.....	22
2.4.3	Jumlah Penduduk Miskin	25
2.4.4	Indeks Kedalaman Kemiskinan.....	26
2.4.5	Indeks Keparahan Kemiskinan	28
2.4.6	Tingkat Pengangguran Terbuka	30
2.4.7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	34
2.4.8	Analisis Prioritas Bidang Kemiskinan dan Ketenagakerjaan.....	35
2.5	Dimensi Pendidikan	37
2.5.1	Perkembangan Capaian Indikator Bidang Pendidikan	38
2.5.2	Posisi Relatif Capaian Indikator Bidang Pendidikan	44
2.5.3	Analisis Prioritas Bidang Pendidikan.....	45
2.6	Dimensi Kesehatan.....	47
2.6.1	Perkembangan Capaian Indikator Bidang Kesehatan	48
2.6.2	Capaian indikator kesehatan terhadap Provinsi dan Nasional	52
2.6.3	Analisis Prioritas Bidang Kesehatan	53
2.7	Dimensi Prasarana/Infrastruktur Dasar	55
2.7.1	Perkembangan Capaian Indikator Bidang Prasarana Dasar.....	55
2.7.2	Capaian indikator Prasarana/Infrastruktur Dasar terhadap Provinsi dan Nasional .	57
2.7.3	Analisis Prioritas Bidang Infrastruktur Dasar	58
2.8	Dimensi Ketahanan Pangan	59
2.8.1	Perkembangan Capaian Indikator Bidang Ketahanan Pangan.....	59
2.8.2	Capaian indikator Ketahanan Pangan terhadap Provinsi	61

2.8.3 Analisis Prioritas Bidang Ketahanan Pangan.....	62
---	----

BAB III. TINJAUAN ANGGARAN BELANJA UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH

3.1 Komposisi Penerimaan Anggaran Daerah	65
3.2 Distribusi Anggaran Belanja Menurut Fungsi	66
3.3 Efektivitas Perkembangan APBD Kabupaten Jombang	68
3.4 Komposisi Anggaran Belanja Sektoral	70
3.4.1 Anggaran Belanja Sektor Pendidikan	73
3.4.2 Anggaran Belanja Sektor Kesehatan.....	75
3.4.3 Anggaran Belanja Sektor Infrastruktur Dasar.....	79
3.4.4 Anggaran Belanja Sektor Ketenagakerjaan	81
3.4.5 Anggaran Belanja Sektor Ketahanan Pangan	83

BAB IV. KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH

4.1 Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan.....	86
4.2 Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	92

BAB V. KOORDINASI, PENGENDALIAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

5.1 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	94
5.1.1 Koordinasi di Tingkat Daerah.....	94
5.1.2 Koordinasi di Tingkat Provinsi dan Pusat.....	96
5.2 Pengendalian Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan	97
5.3 Penanganan Pengaduan Masyarakat	98

BAB VI. PENUTUP

6.1 Prioritas Intervensi Sektoral	100
6.2. Implikasi Penyesuaian Program dan Anggaran Belanja	103
6.3. Rencana Koordinasi Dan Pengendalian Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan	105

DAFTAR PUSTAKA	106
PROFIL PENULIS	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Masyarakat Miskin	1
Gambar 2. Langkah strategis Mengurangi angka kemiskinan tahap 1	3
Gambar 3. Langkah strategis Mengurangi angka kemiskinan tahap 2	4
Gambar 4. Langkah strategis Mengurangi angka kemiskinan tahap 3	4
Gambar 5. Langkah strategis Mengurangi angka kemiskinan tahap 4	5
Gambar 6. Program Keluarga Harapan (PKH)	5
Gambar 7. Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT)	6
Gambar 8. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Jombang	11
Gambar 9. Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Jombang	13
Gambar 10. Struktur Ekonomi Kabupaten Jombang Tahun 2019	16
Gambar 11. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jombang menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019	18
Gambar 12. Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jombang menurut Lapangan Usaha, Tahun 2015-2019	19
Gambar 13. Pertumbuhan Ekonomi (%) Kabupaten Jombang, Tahun 2015-2019	20
Gambar 14. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jombang terhadap Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2015-2019	21
Gambar 15. Perkembangan Tingkat Inflasi Kabupaten Jombang, Tahun 2015-2019	22
Gambar 16. Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kabupaten Jombang terhadap Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019	23
Gambar 17. Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Jombang terhadap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019	23
Gambar 18. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Jombang Tahun 2015-2019 (Sumber: BPS Kabupaten Jombang)	24
Gambar 19. Relevansi Capaian Persentase Kemiskinan Kabupaten Jombang terhadap Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2015-2019	25
Gambar 20. Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Jombang terhadap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019	26
Gambar 21. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Jombang Tahun 2015-2019	26
Gambar 22. Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Jombang terhadap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019	27
Gambar 23. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Jombang Tahun 2015-2019	27
Gambar 24. Relevansi Capaian Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Jombang terhadap Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2015-2019	28
Gambar 25. Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Jombang terhadap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019	29
Gambar 26. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Jombang Tahun 2015-2019	29
Gambar 27. Relevansi Capaian Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Jombang terhadap Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2015-2019	30
Gambar 28. Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Jombang terhadap Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019	31
Gambar 29. Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Jombang	

terhadap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019	32
Gambar 30. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Jombang Tahun 2015-2019	33
Gambar 31. Relevansi Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Jombang terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2019	33
Gambar 32. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Jombang, 2015-2019	34
Gambar 33. Posisi Relatif Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Jombang terhadap Provinsi Jawa Timur dan Nasional, Tahun 2019	35
Gambar 34. Analisis Prioritas Intervensi Bidang Kemiskinan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Jombang Tahun 2015-2019	36
Gambar 35. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI di Kabupaten Jombang, Tahun 2017-2019.....	38
Gambar 36. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs di Kabupaten Jombang, Tahun 2017-2019.....	39
Gambar 37. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA di Kabupaten Jombang, Tahun 2017-2019.....	40
Gambar 38. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI di Kabupaten Jombang, Tahun 2017-2019.....	41
Gambar 39. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs di Kabupaten Jombang, Tahun 2017-2019.....	42
Gambar 40. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA di Kabupaten Jombang, Tahun 2017-2019.....	42
Gambar 41. Perkembangan Angka Melek Huruf di Kabupaten Jombang, Tahun 2017-2019	44
Gambar 42. Analisis Prioritas Intervensi Bidang Pendidikan Kabupaten Jombang Tahun 2015-2019	47
Gambar 43. Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) per 100ribu kh Kabupaten Jombang Tahun 2015-2019.....	48
Gambar 44. Perkembangan Prevalensi Gizi Buruk pada Balita Kabupaten Jombang Tahun 2015-2019	49
Gambar 45. Perkembangan Prevalensi Gizi Kurang pada Balita Kabupaten Jombang Tahun 2015-2019	51
Gambar 46. Perkembangan Persalinan Ditolong oleh Tenaga Medis (%) Kabupaten Jombang Tahun 2015-2019.....	52
Gambar 47. Analisis Prioritas Intervensi Bidang Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2015-2019	55
Gambar 48. Analisis Prioritas Intervensi Bidang Infrastruktur Dasar Kabupaten Jombang Tahun 2015-2019	59
Gambar 49. Produksi Padi Kabupaten Jombang (Ton) Tahun 2015-2019	60
Gambar 50. (a,b,c) Analisis Prioritas Intervensi Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang Tahun 2015-2019	62
Gambar 51. Perkembangan Penerimaan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015-2019 ..	65
Gambar 52. Analisis Efektivitas Perkembangan APBD terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten Jombang.....	69
Gambar 53. Perkembangan Anggaran Belanja Sektor Pendidikan Kabupaten Jombang ..	73
Gambar 54. Efektifitas Anggaran Belanja Bidang Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten Jombang	74
Gambar 55. Perkembangan Anggaran Belanja Bidang Kesehatan Kabupaten Jombang, Tahun 2015-2019	76

Gambar 56. Efektifitas Anggaran Belanja Bidang Kesehatan terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten Jombang	77
Gambar 57. Perkembangan Anggaran Belanja Sektor Infrastruktur Dasar Kabupaten Jombang, Tahun 2015-2019.....	79
Gambar 58. Efektifitas Anggaran Belanja Bidang Infrastruktur Dasar terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten Jombang	80
Gambar 59. Perkembangan Anggaran Belanja Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Jombang, Tahun 2015-2019	81
Gambar 60. Efektifitas Anggaran Belanja Bidang Ketenagakerjaan terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten Jombang	82
Gambar 61. Perkembangan Anggaran Belanja Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang, Tahun 2015-2019.....	83
Gambar 62. Efektifitas Anggaran Belanja Bidang Ketahanan Pangan terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten Jombang	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kecamatan, Luas Wilayah, Jumlah Desa dan Jumlah Dusun di Kabupaten Jombang	12
Tabel 2. Persentase PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2015-2019 Kabupaten Jombang	14
Tabel 3. Pertumbuhan Ekonomi menurut Lapangan Usaha (Persen) ADKH 2010 Tahun 2015- 2019 Kabupaten Jombang	16
Tabel 4. Posisi Relatif Capaian Indikator Bidang Pendidikan Kabupaten Jombang terhadap Provinsi dan Nasional, Tahun 2019	44
Tabel 5. Posisi Relatif Capaian Indikator-Indikator Dimensi Kesehatan Kabupaten Jombang terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2019	53
Tabel 6. Perkembangan Capaian Indikator-Indikator Dimensi Prasarana/Infrastruktur Dasar, Tahun 2017-2019	56
Tabel 7. Posisi Relatif Capaian Indikator-Indikator Dimensi Prasarana/Infrastruktur Dasar, Kabupaten Jombang terhadap Provinsi dan Nasional, Tahun 2019	57
Tabel 8. Perkembangan Capaian Indikator-Indikator Dimensi Ketahanan Pangan, Tahun 2015-2019	60
Tabel 9. Posisi Relatif Capaian Indikator-Indikator Dimensi Ketahanan Pangan, Kabupaten Jombang terhadap Provinsi Jawa Timur, Tahun 2019	61
Tabel 10. Realisasi APBD Kabupaten Jombang Tahun 2015-2019	64
Tabel 11. Proporsi Komponen Realisasi Pendapatan Daerah dalam APBD Kabupaten Jombang Tahun 2015-2019	66
Tabel 12. Proporsi Komponen PAD Kabupaten Jombang Tahun 2015 – 2019	66
Tabel 13. Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015-2018 ...	67
Tabel 14. Proporsi Komponen Belanja Anggaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015-2019	68
Tabel 15. Distribusi Anggaran Belanja Menurut Bidang Kabupaten Jombang Tahun 2015-2019	70
Tabel 16. Proporsi Anggaran Belanja Bidang Intervensi terhadap APBD Kabupaten Jombang	72
Tabel 17. Matrik Hubungan Antara Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi RPJMD Kabupaten Jombang 2018-2023	87
Tabel 18. Matrik Hubungan Strategi dan Program Penurunan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Jombang 2018-2023	89
Tabel 19. Program dan Indikator Program Penurunan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Jombang 2018-2023	89
Tabel 20. Peraturan Daerah/Peraturan Bupati yang Berkaitan dengan Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Jombang	91
Tabel 18. Perkembangan antar waktu dari indikator bidang ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan dan infrastruktur dasar	100

BAB IV
KEBIJAKAN DAN PROGRAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH

4.1 Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu dari pada tujuan pembangunan nasional maupun daerah yang dilaksanakan melalui kebijakan, strategi dan program penanggulangan kemiskinan secara terkoordinasi dari tingkat pusat hingga daerah. Penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Jombang telah terintegrasi dalam kebijakan pembangunan daerah yang tertuang mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 hingga implementasinya dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang. Kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Jombang adalah sesuai dengan Visi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Jombang yaitu: **“Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing.”**

Dengan Misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Profesional
- b. Mewujudkan masyarakat Jombang yang berkualitas, religius dan berbudaya
- c. Meningkatkan daya saing Perekonomian Daerah Berbasis Kerakyatan, Potensi unggulan Lokal dan Industri.

Tujuan:

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Transparan dan Efektif serta Penyelenggaraan Layanan Publik yang Berkualitas,
2. Meningkatkan kualitas SDM
3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
4. Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Jombang yang Religius dan Berbudaya
5. **Menurunkan Tingkat Kemiskinan**
6. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah

Hubungan antara Misi dan Tujuan serta Sasaran dapat dilihat pada table 17.

Tabel 17. Matrik Hubungan Antara Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi RPJMD Kabupaten Jombang 2018-2023

VISI : "Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing"		
Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Profesional		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Tujuan 1: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Transparan dan Efektif serta Penyelenggaraan Layanan Publik yang Berkualitas	Sasaran 1: Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Strategi 1: Memperkuat dan mengakselerasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang didukung oleh ASN yang profesional guna menciptakan kelembagaan birokrasi berbasis digital yang menciptakan pelayanan masyarakat yang prima.
	Sasaran 2: Meningkatkan Kepuasan Masyarakat	
	Sasaran 3: Meningkatkan Profesionalitas Pegawai	
Misi 2: Mewujudkan masyarakat Jombang yang berkualitas, religius dan berbudaya		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Tujuan 2: Meningkatkan kualitas SDM	Sasaran 4: Meningkatkan Derajat Pendidikan	Strategi 2: Optimalisasi pemanfaatan nilai agama, ilmu pengetahuan- teknologi, budaya, dan modal sosial kemasyarakatan untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM yang integratif dan menyeluruh dengan prespektif keadilan dan kesetaraan gender
	Sasaran 5: Meningkatkan derajat Kesehatan	Strategi 3: Meningkatkan akses layanan dan kualitas infrastruktur dasar dan ekonomi yang merata untuk mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat
	Sasaran 6: Meningkatkan daya beli masyarakat	Strategi 4: Penanganan kemiskinan secara komprehensif tematik, terpadu, inklusif, dan partisipatif
	Sasaran 7: Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender	Strategi 2: Optimalisasi pemanfaatan nilai agama, ilmu pengetahuan- teknologi, budaya, dan modal sosial kemasyarakatan untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM yang integratif dan menyeluruh dengan prespektif keadilan dan kesetaraan

VISI : "Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing"		
Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Profesional		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Tujuan 3: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Sasaran 8: kualitas kawasan permukiman	Strategi 3: Meningkatkan akses dan kualitas infrastruktur dasar dan ekonomi yang merata untuk mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat
Tujuan 4: Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Jombang yang Religius dan Berbudaya	Sasaran 9: Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama, ketenteraman, keamanan, ketertiban umum dan kesadaran berbudaya	Strategi 2: Optimalisasi pemanfaatan nilai agama, ilmu pengetahuan- teknologi, budaya, dan modal sosial kemasyarakatan untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM yang integratif dan menyeluruh dengan prespektif keadilan dan kesetaraan gender
Tujuan 5: Menurunkan Tingkat Kemiskinan	Sasaran 10: Menurunnya jumlah penduduk miskin	Strategi 4: Penanganan kemiskinan secara komprehensif tematik, terpadu, inklusif, dan partisipatif
Misi 3: Meningkatkan daya saing Perekonomian Daerah Berbasis Kerakyatan, Potensi Unggulan Lokal Dan Industri		
Tujuan 6: Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah	Sasaran 11: Meningkatnya Investasi Daerah	Strategi 5: Meningkatkan kualitas infrastruktur sebagai penunjang hilirisasi dan interkoneksi untuk daya saing ekonomi dan produktivitas produk unggulan melalui peningkatan daya tarik investasi berwawasan lingkungan dan kemampuan memitigasi resiko bencana
	Sasaran 12: Menurunnya Tingkat Pengangguran	Strategi 6: Pertumbuhan sektor unggulan ekonomi yang inklusif, akselerasi, dan berkelanjutan
	Sasaran 13: Meningkatnya kunjungan wisata	
	Sasaran 14: Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	
Sasaran 15: Meningkatnya Daya Dukung Infrastruktur Untuk Daya Saing	Strategi 5: Meningkatkan kualitas infrastruktur sebagai penunjang hilirisasi dan interkoneksi untuk daya saing ekonomi dan produktivitas produk unggulan melalui peningkatan daya tarik investasi berwawasan lingkungan dan kemampuan	

VISI : "Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing"		
Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Profesional		
Tujuan	Sasaran	Strategi
		memitigasi resiko bencana

Khusus untuk tujuan 5 yaitu menurunkan tingkat kemiskinan dengan Sasaran menurunnya jumlah penduduk miskin dengan strategi Penanganan⁶ kemiskinan secara komprehensif tematik, terpadu, inklusif, dan partisipatif. Berdasarkan strategi yang telah ditentukan diatas, selanjutnya guna dapat implementasikan dalam mencapai sasaran pembangunan Kabupaten Jombang maka strategi pembangunan tersebut dapat dilaksanakan dalam program pembangunan daerah.

Tabel 18. Matrik Hubungan Strategi dan Program Penurunan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Jombang 2018-2023

STRATEGI	PROGRAM
Strategi 4: Penanganan kemiskinan secara komprehensif tematik, terpadu, inklusif, dan partisipatif	¹⁵ Program Peningkatan Kesempatan Kerja
	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro
	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perdagangan dan Perindustrian
	Program Pengembangan Produksi, Penerapan Standarisasi dan Fasilitasi HKI bagi IKM
	Program Pembinaan lingkungan Sosial Bidang Sosial
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Arah kebijakan pembangunan daerah penjabaran dari strategi pembangunan daerah yang sudah ditetapkan dalam hal penanganan kemiskinan secara komprehensif tematik, terpadu, inklusif, dan partisipatif. Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang berdasarkan isu strategis dan sasaran strategis berikut penjabaran program dan indikator program pembangunan daerah:

Tabel 19. Program dan Indikator Program Penurunan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Jombang 2018-2023

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
Program Penguatan Distribusi dan Cadangan Pangan	Jumlah Cadangan pangan Masyarakat (kg/tribulan)
	Persentase informasi pasokan harga dan akses pangan
Program Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Jumlah ketersediaan energi perkapita perhari
	Jumlah Ketersediaan protein perkapita perhari
	Persentase penanganan desa cukup tahan pangan
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Ketahanan Pangan	Persentase pelaku usaha olahan pangan lokal yang bersertifikasi

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pertanian	Level klasifikasi kelas kelompok : utama, madya, lanjut, pemula
Program Penanganan Pasca Panen dan pemasaran Produk Pertanian	Persentase gabungan kelompok tani yang melaksanakan kemitraan pemasaran produk pertanian
	Nilai tambah produk pertanian
Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro	Pertumbuhan volume usaha
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Kontribusi pelatihan usaha bagi industri kecil dan menengah dari DBHCHT
	Prosentase peningkatan omzet pelaku usaha komoditas lokal
Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemantauan Perdagangan	jml omzet penjualan pelaku usaha
Program pengembangan produksi, penerapan standarisasi dan Fasilitasi HKI bagi IKM	Prosentase peningkatan omzet produksi Industri kecil dan menengah
	Prosentase Jumlah tenaga kerja yang terserap sektor Industri kecil dan menengah
Program Pembinaan Industri	Prosentase Industri Hasil Tembakau yang memenuhi standar mutu
Program Rehabilitasi Sosial	Prosentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial
	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
Program Pemberdayaan Sosial	% PSKS yg menyelenggarakan usaha kesos
	% LKS yg menyediakan pelayanan kesos sesuai standar
Program Pengembangan Perumahan	Persentase penanganan rumah tidak layak huni
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Prosentase Pencari Kerja yang Ditempatkan sesuai Kualifikasi
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Prosentase peserta pelatihan yang bersertifikasi
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Tenaga Kerja	Prosentase peserta pelatihan yang ditempatkan dari DBHCHT
Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan rentang koordinasi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat	Angka Melek Huruf
Program peningkatan mutu pendidikan dasar 6 tahun	Rata-rata Nilai USBN SD/MI
	Rata-rata Nilai USBN SD/MI
Program Peningkatan Mutu	Rata-rata Nilai UN/US SMP/MTs

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
Pendidikan Dasar 9 tahun	Nilai Rapor Mutu Sarana Prasarana SMP Negeri/Swasta

Adapun regulasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Jombang untuk mendukung kebijakan dalam upaya-upaya penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut:

Tabel 20. Peraturan Daerah/Peraturan Bupati yang Berkaitan dengan Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Jombang

No	Peraturan Daerah/ Peraturan Bupati	Peraturan Tentang	Keterkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	SK Bupati No.188.4.45/234/415.10.10/2014	Penetapan Database Penduduk Miskin di Kabupaten Jombang	Database penduduk miskin Kabupaten Jombang dalam rangka pemberian pelayanan jaminan kesehatan berupa KJS (Kartu Jombang
2.	Perbup No. 5A Tahun 2015	JaminanKesehatan	Pemberian pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, efisien dan terjangkau bagi penduduk miskin
3.	Perbup No. 8 Tahun 2016	Perubahan Atas Perbup No. 5A Tahun 2015 tentang Jaminan Kesehatan	
4.	Perbup No. 14A Tahun 2016	Perubahan Kedua Atas Perbup No. 5A Tahun 2015 tentang Jaminan Kesehatan	
5.	Perbup No. 1 Tahun 2017	JaminanKesehatan	
6.	SK BupatiNo.188.4.45/196/415.10. 3.4/2017	Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Jombang	Koordinasi dan pengendalian penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jombang
7.	Perbup No. 20 Tahun 2019	Penyelenggaraan Sistem Layanan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang terintegrasi	Peningkatan efektivitas dan efisiensi penanganan kemiskinan di Kabupaten Jombang

4.2 Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, Pemerintah di berbagai tingkatan (pusat, provinsi dan kabupaten/kota) telah menetapkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan melalui strategi penurunan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kebijakan makro dalam strategi penurunan kemiskinan yaitu menjaga stabilitas makro ekonomi, stabilisasi harga, penciptaan lapangan kerja produktif, menjaga iklim investasi, regulasi perdagangan, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, dan pengembangan infrastruktur di wilayah tertinggal. Sedangkan kebijakan mikro diarahkan pada dua hal yaitu menurunkan beban pengetahuan dan meningkatkan pendapatan.

Kebijakan dalam menurunkan beban pengeluaran terdiri dari 4 program sebagai berikut:

1. Bantuan pangan (Rastr) atau Bantuan Program Non Tunai (BPNT)
2. Bantuan Tunai Bersyarat (PKH)
3. Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kartu Indonesia Sehat
4. Bantuan Tunai Pendidikan Kartu Indonesia Pintar

Kebijakan dalam meningkatkan pendapatan dilakukan untuk mempersiapkan masyarakat miskin dan rentan masuk ke dalam kelompok menengah. Kebijakan dalam meningkatkan pendapatan terdiri dari 4 program sebagai berikut:

1. Peningkatan akses permodalan
2. Peningkatan kualitas produk dan akses pemasaran
3. Pengembangan keterampilan dan layanan usaha
4. Pengembangan kewirausahaan, kemitraan, dan keperantaraan.

Dalam memperkuat proses penanggulangan kemiskinan daerah di Kabupaten Jombang, TKPKD Kabupaten Jombang melakukan analisis kemiskinan (menganalisis dan mendiagnosis kondisi kemiskinan suatu daerah), perencanaan (menghasilkan indikasi intervensi program/kegiatan berdasarkan analisis kemiskinan, penganggaran (merumuskan alokasi anggaran berdasarkan jenis dan volume program/kegiatan), monitoring (memantau progress program/kegiatan dari sisi penyerapan anggaran), evaluasi (mengukur efektivitas program dan kegiatan dibandingkan permasalahan kemiskinan).

Kegiatan yang telah dilakukan TKPKD Kabupaten Jombang dalam penanggulangan kemiskinan antara lain:

1. Menganalisis kondisi kemiskinan di Kabupaten Jombang sesuai dengan bidang indikator kemiskinan.
2. Memfasilitasi proses perencanaan dan penganggaran yang *pro-poor* oleh SKPD terkait.
3. Menyusun strategi penanggulangan kemiskinan daerah oleh OPD terkait yang terintegrasi dengan RPJMD.
4. Melakukan advokasi pemantauan dan pengendalian program penanggulangan kemiskinan.
5. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah (LP2KD)
6. Penguatan *data base* kemiskinan (Dinas Sosial)

BAB V KOORDINASI, PENGENDALIAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

5.1 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Agar pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan bisa berjalan baik dan berhasil menurunkan tingkat kemiskinan, maka membutuhkan adanya keterpaduan dan sinergitas antar *stakeholder* yang terlibat, baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Keterpaduan dan sinergitas ini akan terwujud bila terdapat koordinasi yang baik dan berkelanjutan.

Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan agar lebih terkoordinasi dari tingkat pusat hingga daerah, maka pada tahun 2010 dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan selanjutnya diubah menjadi Peraturan Presiden nomor 96 Tahun 2015, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, di tingkat pusat dibentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan di tingkat daerah dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (TKPKD). Tim ini memiliki fungsi dan tugas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawalan dan pemantauan serta pelaporan hasil pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang di daerah disebut LP2KD.

Koordinasi yang dilakukan TKPKD terkait penanggulangan kemiskinan meliputi koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, koordinasi penanggulangan kemiskinan bidang pemberdayaan masyarakat, koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang lainnya

5.1.1 Koordinasi di Tingkat Daerah

Dalam melaksanakan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Jombang telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Jombang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 42 tahun 2010, memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Melakukan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten/Kota. Dalam menjalankan tugas tersebut, tim menjalankan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan SPKD (Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) sebagai dasar penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) bidang penanggulangan kemiskinan;
 - b. pengoordinasian Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD)/gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis SKPD;
 - c. pengoordinasian SKPD/gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah);
 - d. pengoordinasian SKPD/gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja SKPD; dan
 - e. pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.
2. Mengendalikan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten/ Kota. Dalam menjalankan tugas tersebut, tim menjalankan fungsi:
 - a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan;
 - b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penang-gulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
 - c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
 - d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penang-gulangan kemiskinan;
 - e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan;
 - f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati dan TKPK Provinsi.

Guna membantu kelancaran tugas Tim Koordinasi dibentuk:

1. Sekretariat Tim yang bertugas memberikan dukungan administrasi.
2. Tim Kelompok Kerja (Pokja) terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu :

- a. Pokja Pendataan dan Sistem Informasi, bertugas melaksanakan pengelolaan data dan sistem informasi kemiskinan.
 - b. Pokja Pengembangan Kemitraan, bertugas mengembangkan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan.
 - c. Pokja Pengaduan Masyarakat, bertugas melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat.
3. Tim Koordinator Program (Kelompok Program) terdiri:
- a. Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga;
 - b. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil;
 - d. Kelompok Program Perluasan Kesempatan Kerja, Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Perlindungan Sosial.

Masing-masing kelompok program bertugas mengkoordinasikan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan sesuai pembedangannya.

5.1.2 Koordinasi di Tingkat Provinsi dan Pusat

Karena tugas TKPKD sebagian besar terkait dengan koordinasi penanggulangan kemiskinan, maka kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh TKPKD Kabupaten Jombang umumnya berupa:

1. Pelaporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
2. Koordinasi dengan kelembagaan di tingkat Provinsi dan Pusat.
3. Koordinasi permasalahan kemiskinan terkini.
4. Mensinergikan program-program penanggulangan kemiskinan baru.

Kegiatan Rapat Koordinasi TKPK Kabupaten Jombang melibatkan seluruh unsur yang terlibat dalam struktur TKPKD Kabupaten Jombang. Selaku penanggungjawab, Bupati Jombang berperan penting dalam menggerakkan seluruh elemen untuk mensukseskan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jombang.

Di samping rapat-rapat koordinasi, TKPK Kabupaten Jombang juga melakukan kegiatan fasilitasi beberapa kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pihak swasta maupun secara mandiri (swadaya masyarakat).

5.2 Pengendalian Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan

Pelaksanaan ¹⁵ monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jombang dilaksanakan dengan mengamati pencapaian indikator program dan kegiatan dalam tahapan sebagai berikut:

1. masukan (*input*);
2. kegiatan (*process*);
3. keluaran (*output*);
4. sasaran (*outcome*);
5. tujuan (*goals*).

Monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan dilakukan terhadap:

1. monitoring terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang ada di setiap bidang Perangkat Daerah;
2. monitoring terhadap program penanggulangan kemiskinan bersasaran;
3. evaluasi terhadap output program-program penanggulangan kemiskinan yang ada di setiap bidang Perangkat Daerah;
4. evaluasi terhadap capaian indikator-indikator (*outcome*) kemiskinan.

Metode yang digunakan ¹⁷ dalam melakukan monitoring dan evaluasi antara lain:

1. survey: mengumpulkan informasi yang relevan dari responden yang diperoleh dari sampel yang representative
2. metode partisipatif: mendapatkan informasi dengan cara pelibatan secara intensif dan observasi langsung dalam kurun waktu tertentu
3. analisis anggaran: menganalisis item-item pengeluaran program dan membandingkan dengan rencana awal
4. kunjungan lapangan (*spot check /rapid appraisal*): Perolehan informasi secara cepat dari penerima program dan pemangku kepentingan lainnya. Perolehan informasi secara cepat dari penerima program dan pemangku kepentingan lainnya.

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim Koordinator Program dalam TKPK bersama dengan Perangkat Daerah terkait yang menjadi Satuan Kerja (Satker) pelaksana dari setiap Program dan kegiatan dimaksud. Secara rutin setiap tiga bulan TKPK Kabupaten Jombang melakukan rapat koordinasi untuk monitoring dan evaluasi program-program penanggulangan kemiskinan di wilayah kerja Kabupaten Jombang.

5.3 Penanganan Pengaduan Masyarakat

Secara luas, pengertian pengaduan masyarakat pada program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jombang adalah langkah-langkah tindakan masyarakat yang ditujukan pada Pemerintah Kabupaten Jombang, menyangkut:

1. Upaya masyarakat untuk memperoleh informasi/kejelasan mengenai suatu program/kegiatan atau pelayanan yang terkait dengan masyarakat miskin;
2. Upaya masyarakat untuk menyampaikan keluhan terkait dengan pelayanan yang diterima oleh masyarakat miskin;
3. Upaya masyarakat untuk menyampaikan complain terkait dengan kerugian yang dialami oleh masyarakat miskin akibat pelaksanaan pembangunan.

Penanganan pengaduan masyarakat di Kabupaten Jombang secara umum sudah terlaksana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, bahwa penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dengan tenaga pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan dengan mengedepankan azas penyelesaian yang cepat dan tuntas. Tetapi khusus terkait dengan penanggulangan kemiskinan penanganan pengaduan dilakukan oleh Dinas Sosial melalui Program Sistem Layanan Rujukan Terpadu – Pusat Kesejahteraan Sosial (SLRT-Puskesos). Melalui program SLRT – Puskesos dapat dilakukan beberapa hal yaitu:

1. Melalui Puskesos, melayani, mendata, mencatat merujuk permasalahan orang miskin dan tidak mampu serta perempuan dan anak korban kekerasan.
2. Ter-update nya data kemiskinan melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) Next Generation (NG) (Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DTPPFM-OTM)).
3. Memastikan keluhan masyarakat miskin, orang tidak mampu, perempuan dan anak korban kekerasan tertangani dengan baik.

Tugas dan tanggung jawab Puskesos berdasarkan Permensos 15 Tahun 2018 sebagai berikut:

1. Mencatat keluhan penduduk miskin dan rentan miskin ke dalam sistem aplikasi Puskesos yang terhubung dengan SLRT di tingkat daerah Kabupaten/Kota.
2. Melayani, menangani, dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan rentan sesuai dengan kapasitas Puskesos.
3. Memberikan rujukan atas keluhan masyarakat miskin dan rentan kepada pengelola program/layanan sosial di Desa/Kelurahan/nama lain atau daerah di Daerah/Kabupaten/Kota melalui SLRT.

4. Membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan lembaga Non-Pemerintah termasuk pihak swasta di Desa/Kelurahan atau Kabupaten.
5. Mendukung dan memfasilitasi verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di tingkat desa/kelurahan.

Masyarakat miskin dan rentan yang memiliki keluhan dapat melakukan pengaduan melalui *call centre*, media sosial, dan *whatsapp*.

DAFTAR PUSTAKA

1. Laporan Akhir Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Jombang Tahun 2019
2. Ridwan Maulana, "*Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia Bagian Timur*", July 2022, Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, DOI: 10.58192/profit.v1i3.349
3. Rinaldo Isnawan Prasetyono, Dyah Anggraini, "*Analisis Peramalan Tingkat Kemiskinan di Indonesia dengan Model ARIMA*", January 2021 Jurnal Ilmiah Informatika Komputer 26(2):95-110, DOI: 10.35760/ik.2021.v26i2.3699
4. Palupi Lindiasari Samputra, Adis Imam Munandar, "*Korupsi, Indikator Makro Ekonomi, dan IPM terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia*", January 2019, Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan 12(1), DOI: 10.24843/JEKT.2019.v12.i01.p04"
5. Evawaty Tanuar, Violitta Yesmaya, Edy Irwansyah, "*Hubungan Partisipasi Sekolah dengan Tingkat Kemiskinan di Indonesia*", November 2016, Conference: National Conference On Corporate Social Responsibility 2016, Jakarta, Indonesia, Volume: 1
6. Desak Ayu Sriary Bhagawati, Desak Made Sukarnasih, "*Kajian Kemiskinan di Indonesia yang dimediasi oleh adanya pengangguran*", July 2022, Widya Amerta 9(1):56-68, Jurnal Fakultas Ekonomi "Widya Amerta", DOI: 10.37637/wa.v9i1.988
7. Mas'udin Mas'udin, "*Peran belanja pemerintah pusat dalam pengurangan tingkat kemiskinan di indonesia*", November 2017, Jurnal Manajemen Keuangan Publik 1(2):1, DOI: 10.31092/jmkp.v1i2.100
8. Prof. Dr. Susetiawan, et.al, "*Tinjauan Terhadap Efektivitas Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*", March 2013, Project: Strategic Alliance for Poverty Allievation Research (PSPK UGM - PSSAT UGM - SAPA - FORD FOUNDATION)
9. Putri Yaumul Pahlawan, Ratna Ratna, "*Pengaruh Tingkat Pendidikan, tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di indonesia periode 2012-2017*", January 2020, DOI: 10.29103/jmpe.v1i2.882
10. Arif Rahman, dkk, September 2022, "*Anomali pengaruh sektor industri terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia*", September 2022, SOROT 17(2):91, DOI: 10.31258/sorot.17.2.91-103
11. Wawan Kurniawan, November 2017, "*pengaruh pembangunan sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di indonesia (Dengan Kewilayahan Sebagai Variabel Moderasi)*", Jurnal Litbang Sukowati Media Penelitian dan Pengembangan 1(1):22-38, DOI: 10.32630/sukowati.v1i1.3
12. M Rafi Farrel Fuady, Mirza Fuady, Fahmi Aulia, "*Kemiskinan Multi Dimensi dan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia*", November 2021 Jurnal Tataloka 23(4):575-582, DOI: 10.14710/tataloka.23.4.575-582

PROFIL PENULIS



Nama : Dr. Sunardi, SE., MM.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Lengkap : Jl. Danau Paniai H4 E14 RT/RW:003/010 Madyopuro,
Kedungkandang
Alamat Kantor : Jl.Terusan Raya Dieng No.62-64, Pisang Candi, Sukun,
Kota Malang, Kode Pos. 65146
Telepon : +62 812-5218-443
Tempat / Tanggal Lahir : Tulungagung, 19-08-1961
Status : Menikah
Alamat Domisili : Jl. Danau Paniai H4 E14 RT/RW:003/010 Madyopuro,
Kedungkandang
Email : sunardi@unmer.ac.id



Penerbit

ZENIUS
PUBLISHER

Jl. Gentong Desa Waruroyom Kecamatan Depok
Kabupaten Cirebon, Kodepos 45653
email: zenius955@gmail.com
web: zeniuspublisher.com

ISBN 978-623-5264-21-9



9 786235 264219

Penanggulangan Kemiskinan Daerah

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.unisba.ac.id Internet Source	4%
2	purwawinangun.id Internet Source	1%
3	mediaumat.id Internet Source	1%
4	Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper	1%
5	bappeda.jabarprov.go.id Internet Source	1%
6	perakimtan.batam.go.id Internet Source	1%
7	peraturan.bpk.go.id Internet Source	1%
8	radarjombang.jawapos.com Internet Source	<1%
9	www.researchgate.net Internet Source	<1%

10	zombiedoc.com Internet Source	<1 %
11	journal.uwks.ac.id Internet Source	<1 %
12	jurnal.poltekesos.ac.id Internet Source	<1 %
13	mbkm.unmer.ac.id Internet Source	<1 %
14	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1 %
15	bappeda.banyuwangikab.go.id Internet Source	<1 %
16	www.bappeda.brebeskab.go.id Internet Source	<1 %
17	www.scribd.com Internet Source	<1 %
18	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
19	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	<1 %
20	pusdatin.kemsos.go.id Internet Source	<1 %
21	repository.umpri.ac.id	

Internet Source

<1 %

22

bappeda.bangkalankab.go.id

Internet Source

<1 %

23

disdik.slemankab.go.id

Internet Source

<1 %

24

sultra.bpk.go.id

Internet Source

<1 %

25

sepakat.bappenas.go.id

Internet Source

<1 %

26

Submitted to Universitas Andalas

Student Paper

<1 %

27

akurat.co

Internet Source

<1 %

28

apidki-jakarta.weebly.com

Internet Source

<1 %

29

issuu.com

Internet Source

<1 %

30

jurnal.una.ac.id

Internet Source

<1 %

31

Risye F Hetharion, Inta P. N Damanik, Maisie T. F Tuhumury. "KEMANDIRIAN KELOMPOK TANI PEMBIBITAN PALA DAN CENGKEH DI NEGERI LILIBOOI KECAMATAN LEIHITU BARAT

<1 %

KABUPATEN MALUKU TENGAH", Agrilan :
Jurnal Agribisnis Kepulauan, 2020
Publication

32	slideplayer.info Internet Source	<1 %
33	adoc.tips Internet Source	<1 %
34	bappedabima.wordpress.com Internet Source	<1 %
35	eprints.unram.ac.id Internet Source	<1 %
36	esakip.semarangkota.go.id Internet Source	<1 %
37	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
38	tobakab.go.id Internet Source	<1 %
39	moam.info Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On